

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bukan hanya berfungsi memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992).

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini berarti bahwa koperasi sangat berperan aktif dalam peningkatan perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibandingkan tahun 2019. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51 persen. (BPS, 2021)

Sementara itu, kontribusi koperasi di Indonesia terhadap perekonomian nasional masih rendah, baru mencapai 5,1% hingga Juli 2021. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyampaikan koperasi memiliki peran yang besar dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

rakyat. Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota serta masyarakat. Namun, koperasi saat ini belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi penduduk yang menjadi anggota koperasi baru 8,41%. Angka ini masih di bawah rata-rata angka global yang mencapai 16,31%. (BeritaSatu, 2021)

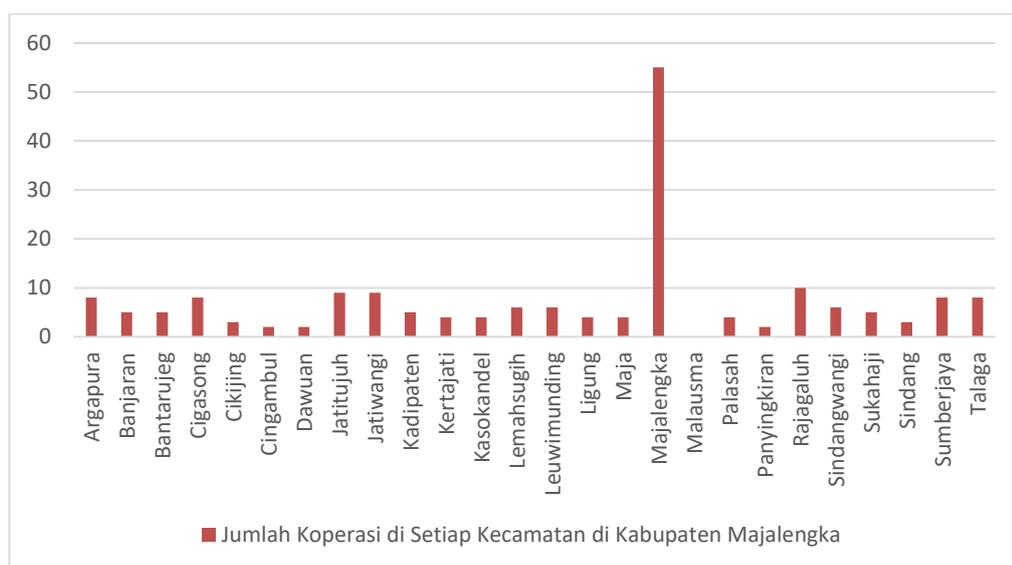
Pada gambar 1.1 terlihat bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami penurunan drastis pada tahun 2018. Pada tahun 2020 koperasi di Indonesia mengalami sedikit kenaikan sebesar 3,31% dari tahun sebelumnya dengan jumlah koperasi sebanyak 127.124 unit. Koperasi terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 22.464 unit dan Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua dengan jumlah koperasi 14.706 unit. (Kemenkopukm, 2020)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2021

**Grafik 1.1 Jumlah Koperasi di Indonesia**

Sementara di Kabupaten Majalengka terdapat sebanyak 310 Koperasi sudah tidak beroperasi. Jumlah koperasi mengalami penyusutan dari 495 koperasi menjadi 185 koperasi hingga 31 Desember 2020. (TintaHijau, 2021)



*Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM Majalengka*

**Grafik 1.2 Jumlah Koperasi di Kabupaten Majalengka Tahun 2020**

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa koperasi yang masih aktif di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 berjumlah 185 koperasi. Kecamatan dengan jumlah koperasi terbanyak berada di Kecamatan Majalengka. Dari yang aktif tersebut, sebanyak 127 koperasi melaksanakan RAT dan 58 koperasi lainnya tidak melaksanakan RAT. Kemudian koperasi yang sudah tidak aktif berjumlah 310 koperasi. Dari yang tidak aktif tersebut, sebanyak 111 koperasi dibina dan 199 lainnya beku.

Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah – masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Salah satu masalah usaha koperasi yaitu masih terdapat koperasi yang manajer dan karyawannya belum memenuhi harapan. Di antara mereka ada yang belum dapat bekerja secara profesional, sesuai dengan peranan dan tugas operasi yang telah ditetapkan. Masih ada administrasi koperasi yang belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan dengan baik. (Sitepu & Hasyim, 2018)

Selain itu, koperasi juga mengalami permasalahan dalam laporan keuangannya. Kepala Disperkop dan UKM Kota Dumai Sepranef Syamsir

Ihda Amatiddiniyah, 2022

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BERBASIS SAK ETAP DI KABUPATEN MAJALENGKA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

mengatakan bahwa peran koperasi masih belum optimal dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Penyebabnya berbagai masalah internal dan eksternal yang melemahkan komitmen terhadap amanat pasal 33 UUD 1945, belum berhasil mencapai takaran pondasi dan bangunan perekonomian yang sehat, kokoh dan mandiri. (Dumai, 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012 Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya baik oleh anggota koperasi khususnya maupun oleh masyarakat pada umumnya. Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi atau penyampaian laporan keuangan secara benar dan tertib. Oleh karena itu, koperasi dikatakan berkualitas apabila laporan keuangannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan (Harahap & Syafri, 2015). Tujuan laporan keuangan koperasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penyusunan laporan keuangan koperasi mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP ini bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Namun dalam kenyatannya, masih banyak laporan keuangan koperasi yang belum berkualitas dikarenakan penyusunan laporan keuangannya yang tidak sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini terlihat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di beberapa koperasi di Indonesia, masih banyak koperasi di Indonesia yang belum menggunakan SAK ETAP yang sesuai dengan ketentuan. Penyusunan laporan keuangan belum dilaksanakan secara benar dan utuh serta tidak memenuhi kriteria kelengkapan dalam kualifikasi laporan keuangan. Komponen laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP meliputi neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (Peraturan Menteri Negara KUKM RI Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012)

**Tabel 1. 1 Penerapan SAK ETAP Pada Koperasi di Indonesia**

Nama Koperasi	Hasil Penelitian
Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera di Bekasi, Jawa Barat	Koperasi Serba Usaha Bina Sejahtera sudah menjalankan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dengan baik. Tetapi, terdapat laporan yang tidak dibuat dikoperasi ini yaitu laporan perubahan ekuitas. (Debora, 2018)
Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Sumenep	Penyajian laporan keuangan KPRI di Sumenep belum sepenuhnya sesuai dengan SAK ETAP. KPRI Setia dan KPRI Angkasa hanya menyajikan neraca dan perhitungan rugi laba, KPRI Kesehatan, KPRI Serba Usaha, dan KPRI Beringin menyajikan neraca, perhitungan

Nama Koperasi	Hasil Penelitian
	rugi laba dan posisi kas. Dari ke lima objek yang diteliti belum ada yang menerapkan lima laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP, yaitu neraca, laporan laba rugi, Laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. (Rahmany, 2019)
Koperasi Simpan Pinjam di Jawa Timur	Tingkat keterterapan SAK-ETAP pada koperasi di Jawa Timur masuk pada kategori “Kurang Diterapkan”. Selanjutnya dengan menggunakan analisis data berupa <i>independent t-test</i> ditemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kelompok pelaku koperasi dengan akuntan pendidik. Beberapa temuan riset empiris SAK-ETAP di Indonesia yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya juga turut dipaparkan. (Narsa & Isnalita, 2017)
Koperasi di Kota Palembang	SAK-ETAP pada koperasi di Kota Palembang belum diterapkan secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan. Dari 33 koperasi yang menjadi objek penelitian hanya 3 koperasi yang membuat laporan

Nama Koperasi	Hasil Penelitian
	keuangan secara utuh yaitu terdiri dari neraca, laporan sisa hasil usaha, perubahan ekuitas, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sementara 30 koperasi yang lainnya tidak membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan sisa hasil usaha yang telah dibuat juga dilihat dari tiap-tiap akun masih belum sesuai dengan standar. Catatan atas laporan keuangan juga hampir tidak ada yang melaporkan. (Gozali & Kesuma, 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kabupaten Majalengka, bahwa baru sebanyak 50 koperasi di Kabupaten Majalengka yang sudah melaksanakan pelatihan SAK ETAP dan sisanya masih menyusun laporan keuangan sesuai yang mereka paham dan ada yang masih menggunakan PSAK 27 tentang akuntansi perkoperasian dalam menyusun laporan keuangannya. Padahal PSAK 27 sudah resmi dicabut sejak tanggal 1 Januari 2011 dan diganti dengan SAK ETAP. Pencabutan PSAK 27 ini dilandasi alasan sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang menyebabkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010).

Masalah kualitas laporan keuangan koperasi di Kabupaten Majalengka terlihat dari laporan keuangannya yang belum dapat memberikan informasi keuangan yang relevan dan andal sesuai standar. Hal ini karena masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP. Dari 50 koperasi

yang sudah melaksanakan pelatihan SAK ETAP tersebut, belum semuanya menerapkan dikarenakan terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman akuntansi.

Ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan tersebut disebabkan oleh lemahnya kualitas SDM untuk menerapkan SAK ETAP, yang berakibat pada ketidakwajaran dalam pelaporan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun koperasi belum memenuhi SAK ETAP (Gozali & Kesuma, 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian Indrawan et al (2017) bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga apabila kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi meningkat maka meningkat pula kualitas laporan keuangan pada koperasi, begitupun sebaliknya.

Kemudian hal - hal yang membuat koperasi memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan SAK ETAP adalah karena minimnya pengetahuan mengenai SAK ETAP itu sendiri dan kurangnya kesadaran manajemen akan pentingnya laporan keuangan (Pangemanan & Siagian, 2016). Kualitas laporan keuangan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya yang salah satunya dapat dilihat dari pemahaman akuntansi. (Ayem & Nugroho, 2020)

Dampak dari rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi yaitu koperasi nantinya tidak dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya, dikarenakan laporan keuangannya tidak memberikan informasi akuntansi terkait usahanya. (Rudiantoro & Veronica, 2010). Hal ini sesuai dengan tujuan SAK ETAP yaitu memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016). Selain itu, apabila laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas, maka informasi keuangan yang disajikan tidak dapat diakui, diterima dan dipercaya baik oleh anggota koperasi khususnya maupun oleh masyarakat pada umumnya (Menteri Negara KUKM RI Nomor: 04/PER/M.KUKM/VII/2012).

**Ihda Amatiddiniyah, 2022**

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BERBASIS SAK ETAP DI KABUPATEN MAJALENGKA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Di Indonesia, koperasi mempunyai fungsi dan peranan penting. Dimana untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992)

Sebagai alat pertanggungjawaban, koperasi perlu menyusun laporan keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pengendalian koperasi. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan suatu pedoman agar laporan keuangan dapat disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya keseragaman tiap laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Pedoman penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasi dan membandingkan laporan keuangan tiap perusahaan. (Kurniawati, 2020)

Laporan keuangan koperasi mengacu pada SAK ETAP. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan Standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan untuk UKM. Didalamnya termasuk Koperasi yang mempunyai skala kecil menengah dalam arus kas keuangan serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk mengelola dan menyajikan Laporan Keuangan Koperasi dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum yang terlalu kompleks untuk UKM. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2013)

Penelitian Sabella (2016) mengungkapkan faktor - faktor yang menyebabkan masih banyaknya koperasi yang belum menerapkan SAK ETAP yaitu meliputi latar belakang pendidikan, sosialisasi ataupun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi koperasi masih belum maksimal, sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih kurang dipahami oleh pelaku koperasi.

Kemudian faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi menurut Ayu et al (2021) meliputi sumber daya manusia, pengendalian internal akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengalaman kerja, pemahaman akuntansi, pengaruh stres kerja, tingkat pendidikan, budaya etis organisasi. Faktor utama yang mempengaruhi adalah pengendalian internal akuntansi dimana koperasi sebaiknya memberikan pemahaman akuntansi dan meningkatkan pengendalian internal agar kualitas laporan keuangan tidak akan terjadi kecurangan pada koperasi.

Dengan demikian, peneliti memilih variabel pemahaman akuntansi karena merupakan faktor utama yang sangat penting dimiliki oleh pengurus koperasi bagian akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa pemahaman yang baik atas SAK ETAP merupakan hal terpenting dari prospek implementasi SAK ETAP pada koperasi. (Oktaritama & Januarti, 2019)

Hasil penelitian Riyadi (2020) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan koperasi. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami benar tentang akuntansi. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan apabila orang – orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan mengerti dan memahami proses akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. (Poerdarminta, 2006)

Hasil penelitian Syahputera & Rianty (2019) menunjukkan bahwa peranan ketua koperasi dan manajer berpengaruh terhadap penyusunan dan penerapan laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Semakin tinggi peranan

pengurus dan manajer koperasi maka pemahaman pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP tentu akan meningkat pula.

Kurangnya pemahaman akuntansi dari pengurus koperasi yang menyusun laporan keuangan ini mengakibatkan rendahnya kualitas laporan keuangan koperasi (Yuliani et al., 2010). Sehingga diperlukan pembenahan dengan meningkatkan pemahaman akuntansi oleh pengurus koperasi bagian keuangan atau akuntansi.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka”.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pemahaman akuntansi pengurus koperasi bagian keuangan di Kabupaten Majalengka
2. Bagaimana gambaran kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka
3. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan gambaran pemahaman akuntansi pengurus koperasi bagian keuangan di Kabupaten Majalengka
2. Untuk menjelaskan gambaran kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP di Kabupaten Majalengka

Ihda Amatiddiniyyah, 2022

*PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOPERASI BERBASIS SAK ETAP DI KABUPATEN MAJALENGKA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat praktis bagi koperasi

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan oleh koperasi di Indonesia untuk perbaikan laporan keuangan kedepannya yang sesuai dengan standar, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi tersebut serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### 2. Manfaat teoritis bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai bagaimana pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP.